

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI**

TESIS

OLEH :

**RONI SINAGA
241801020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :

**RONI SINAGA
241801020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing
Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan**

N a m a : Roni Sinaga

N P M : 241801020

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr.Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pembimbing II



Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Adam, SE, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah di uji pada Sabtu, 18 April 2026

Nama : Roni Sinaga

NPM : 241801020



Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Sekretaris	: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP
Penguji I	: Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Penguji II	: Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A
Penguji Tamu	: Dr . Indra Muda, M.AP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 TebingTinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, April 2026



Roni Sinaga

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Sinaga
NPM : 241801020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan

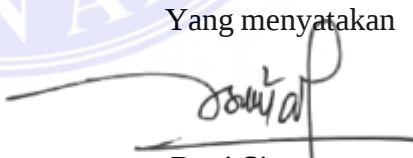
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan


Roni Sinaga

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI

Nama : Roni Sinaga
NPM : 241801020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr.Nina Siti Salaria Siregar,M.Si
Pembimbing II : Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan komunikasi, belum meratanya kompetensi guru, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman terhadap konsep pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran masih didominasi metode konvensional sehingga tujuan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya tercapai. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui pelatihan guru, pendampingan pembelajaran, penyusunan modul ajar, serta peningkatan kerja sama dengan dunia industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan, Implementasi.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT CURRICULUM IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AT SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI

Name : Roni Sinaga
NPM : 241801020
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr.Nina Siti Salamiah Siregar,M.Si
Supervisor II : Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA

This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum at SMK Negeri 4 Tebing Tinggi and to identify the factors influencing its implementation. This research employs a qualitative approach using data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The informants consist of the principal, vice principal, teachers, and students. Data analysis was conducted inductively based on George Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the Merdeka Curriculum at SMK Negeri 4 Tebing Tinggi has been carried out, but it has not been fully optimal. The main obstacles include limited communication, uneven teacher competence, inadequate facilities, and low understanding of project-based learning concepts. Learning activities are still dominated by conventional methods, causing the objectives of the Merdeka Curriculum to not be fully achieved. The school's efforts to overcome these obstacles include teacher training, instructional assistance, preparation of teaching modules, and strengthening cooperation with industry partners. This study concludes that strengthening support systems, improving human resource quality, and ensuring policy consistency are necessary to enhance the effectiveness of the Merdeka Curriculum implementation.

Keywords: Curriculum, Implementation, Education.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI**” . Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Adminidtrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

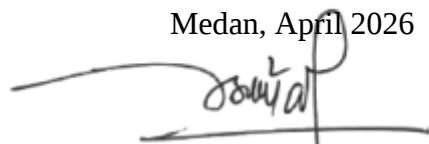
Dalam penyusunan Tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Bapak Dr. Adam, SE.,M.AP yang telah banyak memberikan dukungan untuk meyelesaikan studi dengan cepat
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

5. Pembimbing II, Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Bapak/Ibu dosen dan karyawan Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Suami saya Daniel Silaban, ST yang telah memberikan dukungan moral, doa, kesabaran serta pengorbanan selama proses penyusunan tesis hingga selesai.
8. Ananda tersayang Geri Gunara dan Gracela Ulina yang memberikan dukungan doa dan kasih sayang.
9. Segenap keluarga, sahabat, rekan kerja, dan rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang membangun demi penyempurnaan dari Tesis ini.

Medan, April 2026



RONI SINAGA
NPM 24180102

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRCT.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Masalah	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Kebijakan Publik	8
2.1.2. Implementasi Kebijakan	10
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	10
b. Model Implementasi oleh George Edward III.....	12
c. Kurikulum Merdeka.....	15
d. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK.....	21
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu	34
2.3. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian	41
3.2.1. Lokasi Penelitian	41
3.2.2. Waktu Penelitian.....	42
3.3. Informan Penelitian	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data	45
3.5. Teknik Analisis Data	47
3.6. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	50
3.6.1. Defenisi Konseptual.....	50
3.6.2. Definisi Operasional	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54

4.1. Profil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Tebing Tinggi	54
4.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Tebing Tinggi	56
4.1.2. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Tebing Tinggi	58
4.2. Hasil Penelitian	59
4.2.1. Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Tebing Tinggi	59
a. Komunikasi di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi	60
b. Sumber daya di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi	69
4.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi	75
4.2.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka	88
4.3. Pembahasan	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahul	24
Tabel 2 Waktu Penelitian.....	30
Tabel 2 Informan Penelitian.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 2 Struktur Organisasi SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu tujuan utama Pembangunan nasional Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah memperkenalkan berbagai kebijakan pendidikan, salah satunya adalah Kurikulum Merdeka. Masa depan bangsa terletak pada tangan kreatif generasi muda. Mutu bangsa kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dinikmati anak-anak saat ini, terutama dalam pendidikan formal yang diterima di bangku sekolah. Jadi, barang siapa yang menguasai kurikulum maka ia memegang peran penting dalam mengatur nasib bangsa dan negara kedepannya. Melihat betapa pentingnya kurikulum bagi pendidikan, dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan suatu hal yang vital bagi pendidikan. Sehingga para guru harus memahami kandungan kurikulum, karena telah jelas tujuan pendidikan terdapat dalam kurikulum. Sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan kondusif, interaktif, efektif dan lancar.

Indonesia merupakan negara yang pendidikannya masih tergolong terbelakang, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Menurut data yang ada bahwa salah satu fakta yang membuat memilukan bagi Indonesia adalah pendidikan Indonesia menempati peringkat 57 dari 65 negara, pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Fakta serupa juga pada tahun 2014 yang dihimpun oleh *Global Talent Competitiveness Index*, yang menyebutkan bahwa Indonesia peringkat 86 dari 93 negara dalam hal daya saing pekerja.

Kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Kurikulum ini merupakan perubahan dari kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan nama Kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang ditujukan untuk siswa di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat (Suryaman, 2001).

Kurikulum Merdeka diharapkan mampu memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini menjadi sangat relevan untuk diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat SMK memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di dunia industri.

Kurikulum Merdeka menekankan pada aspek kemandirian dan keberanian siswa dalam belajar, serta memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Ansari, Alpisah, & Yusuf, 2022). Kurikulum ini juga menekankan pada aspek karakter siswa, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif (Lazwardi, 2017). Kurikulum ini juga mencakup materi yang lebih luas dari pada Kurikulum 2013, termasuk ilmu pengetahuan alam, sosial, dan teknologi.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah (Efyanto, 2021). Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta proses pembelajaran yang efektif dan

menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Implementasi kurikulum merdeka di Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti pertama, kurangnya kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Priyambodo, 2017). Beberapa guru mungkin belum memahami secara detail tentang Kurikulum Merdeka dan cara mengajarnya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terbiasa dengan kurikulum ini. Kedua, Kurangnya sumber daya yang tersedia untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa bahan ajar, perangkat pembelajaran, atau fasilitas yang dibutuhkan untuk mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

Ketiga, Kurangnya dukungan dari orang tua siswa. Beberapa orang tua mungkin masih belum memahami pentingnya Kurikulum Merdeka bagi perkembangan anak-anak mereka, sehingga tidak memberikan dukungan yang cukup untuk implementasi kurikulum ini (Pertwi, Nurfatimah, & Hasna, 2022). Keempat, Kurangnya koordinasi antar sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Beberapa sekolah mungkin memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga dapat menyulitkan siswa yang pindah ke sekolah lain untuk terbiasa dengan metode pembelajaran yang berbeda. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya yang terpadu dan konsisten dari pemerintah, guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, sebagai institusi pendidikan kejuruan, memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang kompeten di dunia kerja

dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Pendidikan kejuruan yang berkualitas tidak hanya menekankan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter, adaptabilitas, dan kecakapan hidup. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika dunia kerja. Sekolah telah menerapkan Kurikulum Merdeka menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan pembaruan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru-guru mulai menyusun modul ajar secara mandiri, menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), serta melaksanakan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan belajar siswa. Lingkungan sekolah pun berupaya menciptakan suasana belajar yang fleksibel, kolaboratif, dan kontekstual.

Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan observasi awal peneliti pada SMK Negeri 4 Tebing Tinggi serta informasi yang diperoleh dari guru dan siswa, ditemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi sejumlah kendala nyata di tingkat sekolah. Dari observasi kegiatan pembelajaran di beberapa kelas, terlihat bahwa sebagian guru masih menggunakan pola pembelajaran lama yang berpusat pada guru (teacher centered), seperti ceramah dan penugasan tertulis, sementara pendekatan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka belum dilaksanakan secara konsisten. Tidak semua guru memiliki pemahaman dan ketrampilan yang memadai terkait penyusunan modul ajar, diferensiasi pembelajaran, maupun pengelolaan proyek lintas mata pelajaran. Hal ini menyebabkan beberapa guru juga masih menggunakan perangkat ajar lama

yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka.

Selain itu, berdasarkan hasil rapat internal guru SMK Negeri 4 Tebing Tinggi yang membahas pelaksanaan Kurikulum Merdeka, terungkap bahwa banyak guru merasa masih kurang mendapatkan pendampingan teknis, terutama dalam hal penyusunan modul ajar, asesmen diagnostik, dan penilaian berbasis kompetensi. Guru menyampaikan bahwa sosialisasi Kurikulum Merdeka lebih banyak bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan praktis di kelas, khususnya untuk pembelajaran kejuruan.

Dari sisi siswa, dengan beberapa peserta didik, diperoleh informasi bahwa mereka masih mengalami kebingungan terhadap sistem pembelajaran yang baru. Siswa menyatakan bahwa tugas proyek sering kali diberikan tanpa penjelasan yang cukup mengenai tujuan, kriteria penilaian, dan keterkaitannya dengan kompetensi keahlian yang sedang dipelajari. Hal ini membuat sebagian siswa merasa terbebani dan kurang memahami manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam menunjang kesiapan kerja mereka.

Selain itu, dari aspek sumber daya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa beberapa fasilitas praktik dan perangkat pembelajaran belum sepenuhnya mendukung Kurikulum Merdeka, seperti keterbatasan alat praktik di bengkel, laboratorium, dan keterbatasan perangkat teknologi pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran berbasis proyek dan praktik industri belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi masih menghadapi masalah utama pada

aspek komunikasi kebijakan dan ketersediaan sumber daya, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas pembelajaran dan kesiapan kerja siswa.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana variabel-variabel tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi. Penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari implementasi kurikulum terhadap kualitas pendidikan, termasuk hasil belajar siswa, kesiapan memasuki dunia kerja, dan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan industri.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah kejuruan, serta memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan?
2. Apa faktor penghambat dalam Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan?

1.3. Tujuan Masalah

Adapun Tujuan Masalah Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam Implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Pada Penelitian ini Adalah :

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yakni dengan mempelajari apa saja yang menjadi masalah dalam kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Memberi informasi dan masukan bagi SMK Negeri 4 Tebing Tinggi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di pendidikan vokasi.
5. Secara praktis, dapat memberikan informasi dan masukan bagi guru dan tenaga pendidikan tentang strategi implementasi kurikulum yang efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama disebut sebagai Kebijakan Publik. Kebijakan public merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah public dan mencapai tujuan tertentu. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal. Sadhana (2011:47) mengutip pendapatnya *John Dewey*, mengungkapkan bahwa terdapat dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yaitu bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Thomas R. Dye dalam buku *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, yang ditulis oleh Riant Nugroho D.(2006: 137-139) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*”, yaitu segala hal atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya.

Dalam perspektif nasional, Budi Winarno (2002), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik serta mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan publik bukan sekedar keputusan tunggal, melainkan suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi hingga evaluasi. Dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Budi Winarno menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik penting :

1. Kebijakan sebagai tindakan yang disengaja.

Kebijakan merupakan tindakan yang direncanakan secara sadar oleh pemerintah, bukan tindakan yang bersifat kebetulan atau spontan

2. Kebijakan memiliki tujuan tertentu

Setiap kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mengatasi persoalan publik

3. Kebijakan dilakukan oleh aktor pemerintah

Kebijakan public berkaitan erat dengan peran lembaga Negara dan pejabat public yang memiliki kewenangan.

4. Kebijakan bersifat mengikat

Karena dibuat oleh otoritas yang sah, kebijakan publik memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat

5. Kebijakan sebagai proses politik dan administratif

Kebijakan publik tidak terlepas dari dinamika politik, kepentingan, serta proses administrative dalam birokrasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan dari pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka menanggapi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh masyarakat.

Dalam menganalisis kebijakan, Riant Nugroho (2021) kita harus melihat interaksi antara tiga elemen :

1. Pelaku kebijakan (Policy Stakeholders): individu atau kelompok yang memengaruhi dan dipengaruhi kebijakan (pejabat, LSM, partai politik, warga negara)
2. Lingkuagn Kebijakan (Policy Environment); kondisi ekonomi, budaya, dan politik yang melatarbelakangi munculnya masalah
3. Isi Kebijakan (Policy Content): Dokumen resmi yang menuat rencana tindakan, target, dan anggaran.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Implementasi kebijakan adalah proses untuk mewujudkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata. Ditekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh keberhasilan implementasi, selebihnya ditentukan oleh formulasi

(perencanaan) dan evaluasi, artinya implementasi bukan sekedar urusan administrasi, melainkan inti dari proses kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2003). Konsep dasar implementasi kebijakan publik ini mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara menyeluruh.

Menurut (Leo Agustino, 2006) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Leo Agustino sering merujuk pada pengembangan teori George Edward III. Ia merangkum beberapa factor yang menentukan apakah sebuah kebijakan akan berhasil atau gagal dilapangan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Menurut George C.Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses antara perumusan kebijakan dan hasil kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier, bahwa pelaksanaan keputusan dasar biasanya dalam bentuk

undang-undang, namun juga dapat berupa perintah eksekutif atau keputusan penting lainnya.

Secara umum, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan dan prespektif. Dari prespektif masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan, prespektif perilaku untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran, serta prespektif hasil untuk melihat konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kapasitas dan komitmen para pelaksana. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi serta integritas yang kuat akan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang tepat sasaran. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Model Implementasi oleh George Edward III

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III merupakan salah satu teori yang paling populer dalam studi kebijakan publik. Edward III memandang bahwa implementasi adalah tahap krusial yang menentukan apakah sebuah kebijakan akan berhasil mencapai tujuannya atau justru gagal di lapangan. Menurutnya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada empat faktor (variabel) utama yang saling berhubungan, yaitu :

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi menjadi elemen pertama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan

harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Ketidakjelasan informasi atau perbedaan interpretasi dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai. Oleh karena itu, proses transmisi informasi harus dilakukan secara efektif dari pembuat kebijakan hingga pelaksana

Agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, para pelaksana (implementor) harus mengetahui apa yang harus dilakukan

- a. Transmisi : Perintah dan petunjuk pelaksanaan harus disampaikan secara jelas kepada orang yang tepat
- b. Kejelasan : Instruksi tidak boleh membingungkan atau bermakna ganda. Jika petunjuknya kabur, pelaksana akan menginterpretasikannya sendiri-sendiri
- c. Konsisten : Instruksi yang diberikan harus konsisten. Jika perintah berubah-ubah, akan timbul kebingungan di tingkat bawah.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya ini mencakup tenaga kerja yang kompeten, anggaran yang cukup, serta fasilitas pendukung lainnya. Bahkan jika komunikasi sudah berjalan dengan baik, kekurangan sumber daya tetap dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Meskipun perintah sudah jelas, implementasi tetap akan gagal jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai :

- a. Staf (Manpower) : Jumlah staf yang cukup dan memiliki keahlian yang relevan.

- b. Informasi : Pengetahuan tentang cara melaksanakan kebijakan dan data mengenai kepatuhan pihak lain
- c. Wewenang : Legalitas pelaksana untuk membuat keputusan atau memaksa kepatuhan
- d. Fasilitas : Sarana fisik seperti gedung, peralatan, dan teknologi yang menunjang pekerjaan

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen, kejujuran, dan kemauan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang negatif atau tidak mendukung kebijakan, maka implementasi akan menghadapi hambatan serius.

Disposisi adalah sikap, watak, atau komitmen para pelaksana terhadap kebijakan,

- a. Dukungan Implementor: Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Jika tidak, mereka mungkin melakukan penghambatan (sabotase)
- b. Insentif: Adanya penghargaan (reward) atau sanksi (punishment) dapat mempengaruhi motivasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai aturan.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi yang jelas, prosedur yang sederhana, serta mekanisme koordinasi yang efektif akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang rumit dan berbelit-

belit dapat memperlambat proses pelaksanaan serta menimbulkan inefisiensi

Organisasi pelaksana memiliki peran besar dalam menentukan alur kerja,

- a. Standard Operating Procedures (SOP): Prosedur tetap yang membantu menyederhanakan tugas-tugas kompleks. Namun, SOP yang terlalu kaku bisa menghambat inovasi jika situasi di lapangan berubah
- b. Fragmentasi: Pembagian tanggung jawab di antara berbagai unit kerja. Jika koordinasi antar unit buruk, implementasi akan tersekat-sekat dan tidak efisien.

Teori lain dari Sabatier dan Mazmanian (1980) menyoroti pentingnya pengaruh variabel eksternal seperti dukungan politik dan komitmen masyarakat terhadap keberhasilan implementasi. Perspektif ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan konteks.

c. Kurikulum Merdeka

Berbicara tentang kurikulum tak terlepas dengan lembaga pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum itu sendiri. Sejarah pendidikan di Indonesia sendiri sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang mana dilakukan oleh Lembaga pendidikan pesantren. Kemudian setelah bangsa ini Merdeka barulah Indonesia memiliki sekolah yang dikelola sendiri karena sebelum kemerdekaan system persekolahan dikuasai oleh para penjajah.

Istilah kurikulum menjadi populer sejak tahun 1950 di Indonesia, yang mana dikenalkan oleh sejumlah kalangan pendidik lulusan Amerika Serikat. Sebelum mengenal istilah kurikulum, pendidikan Indonesia lebih akrab dengan istilah rencana pembelajaran. Kurikulum sendiri mempunyai definisi yang berbeda-beda hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan latar belakang keilmuan para ahli tersebut, sehingga semantik definisi yang dirumuskan akan berbeda meskipun pada intinya terkandung maksud yang sama. Kurikulum menjadi bagian terpenting dalam proses pendidikan. Sejalan dengan kemajuan pendidikan yang semakin meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara sah, kurikulum sejak masa lampau atau di masa penjajahan sudah diterapkan di sekolah. Artinya, istilah kurikulum pendidikan di masa-masa penjajahan sudah digunakan, walaupun dengan niat dan tujuan yang menguntungkan penjajah. Seperti contoh pendidikan di masa penjajahan Jepang, ternyata para penjajah memanfaatkan warga pribumi untuk mengabdikan kepada mereka dengan cara menyeleksi mereka terlebih dahulu. Menurut Makmur Untuk melaksanakan tugas mengajar di sekolah, maka Jepang mengambil tenaga pendidik dari Indonesia yang diseleksi di setiap kabupaten (Aslan, 2019).

Berdasarkan sejarah, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami banyak perombakan dan perubahan karena banyaknya faktor yang mengharuskan kurikulum berubah. Menurut Nasution mengatakan bahwa kurikulum selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara

dijajah menjadi negara Merdeka (Farah Dina Insani, 2019). Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam mengimplementasikannya (Fitri Wahyuni, 2015).

Kurikulum merdeka belajar merupakan sebuah gebrakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia sekarang yaitu Nadiem Anwar Makarim. Kurikulum tersebut beliau sampaikan pada Hari Pendidik Nasional bulan November tahun 2019, dan kurikulum ini telah mengejutkan banyak pihak. Sejatinya gebrakan ini merupakan suatu Langkah strategis dan inovatif sekaligus tantangan besar dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia.

Kurikulum merdeka belajar sudah diterapkan di Indonesia khususnya di sekolah-sekolah yang mendapatkan amanah sebagai sekolah pusat keunggulan untuk SMK dan sekolah penggerak untuk SMA pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Gagasan tersebut berupa Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), pengembangan perangkat ajar termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih fleksibel sesuai kondisi atau kebutuhan sekolah dan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperluas.

Menurut Keputusan Mendikbudristek, bahwa Kurikulum Merdeka belajar secara operasional dikembangkan dan disusun oleh satuan sekolah dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional atau profil pelajar pancasila, standar kompetensi lulusan (isi, proses dan penilaian), struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran serta asesmen

(Salinan Kepmen SMK Pusat Keunggulan, 2021). Dengan begitu, satuan pendidikan bisa dengan leluasa merancang kurikulum merdeka belajar sesuai dengan kondisi geografis daerah, kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Dan berarti kurikulum baru ini, cukup berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang secara operasional sudah disusun oleh pemerintah dan sekolah hanya menjalankannya.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan berjalannya waktu telah mengalami perubahan atau penyempurnaan, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan yang mengalami penyempurnaan diantaranya kebijakan kemenristek dikti nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Dalam keputusan menteri tersebut, dijelaskan bahwa program sekolah penggerak merupakan sebuah program yang berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan perihal mutu serupa. Program sekolah penggerak dilaksanakan melalui kurikulum merdeka dimana kurikulum yang diterapkan pada sekolah penggerak merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 yaitu kurikulum merdeka dengan mengedepankan hasil belajar peserta didik berdasar pada profil pelajar Pancasila (Javanisa et al., 2022).

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan langkah penting dalam menyesuaikan pendidikan vokasi dengan tuntutan zaman. Ini menandai pergeseran dari metode pengajaran tradisional ke pendekatan yang lebih berfokus pada pengembangan soft skills, kreativitas, dan pembelajaran mandiri. Dalam konteks SMK, kurikulum ini dirancang untuk lebih

menekankan pada aplikasi praktis pengetahuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa serta menutup kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan industri (Mulyasa, 2023).

Tujuan utama dari Kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan fleksibel, yang mampu mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri (Mulyasa, 2021). Hal ini penting untuk mengembangkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi. Dalam jangka panjang, kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan SMK yang lebih siap beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan industri.

Kurikulum yang diusung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, NadiePm Makarim, ini memiliki beberapa keunggulan. Menurut beliau keunggulan Kurikulum Merdeka yang pertama adalah Kurikulum Merdeka lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya.

Keunggulan kurikulum merdeka yang kedua adalah tidak ada program peminatan bagi siswa jenjang SMA. Guru dan siswa memiliki kemerdekaan dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya, dan guru dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Pihak sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Keunggulan lain dari Kurikulum Merdeka ini lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan proyek yang dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk lebih aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Fleksibilitas: Satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam menentukan struktur kurikulum sesuai kebutuhan.
2. Berpusat pada Siswa: Kurikulum menekankan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan potensi siswa.
3. Pembelajaran Berbasis Proyek: Penekanan pada kegiatan pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik pendidikan vokasi yang berorientasi pada keterampilan kerja. Penerapan kurikulum ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
- b) Mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis siswa.
- c) Meningkatkan kerja sama antara sekolah dan industri.

Dalam kurikulum merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk memilih cara belajar yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Hal ini membuat mereka lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan

dengan tempat kerja, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa depan (Fitriana, 2020).

Belajar Mandiri adalah suatu konsep yang memungkinkan siswa untuk belajar sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Konsep ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Merdeka Learning juga memungkinkan siswa untuk menggali minat dan bakatnya serta mengembangkan potensinya secara optimal (Yudhana, 2021). Kurikulum Merdeka adalah seperangkat standar pendidikan yang harus diikuti oleh semua sekolah di Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membantu siswa berkembang menjadi orang dewasa yang produktif, kreatif, dan inovatif. Guru perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga siswa dapat belajar lebih mudah dan lebih termotivasi untuk belajar

d. Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK melibatkan beberapa komponen penting:

a. Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan proyek sebagai media utama dalam proses belajar. PjBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses eksplorasi, pemecahan masalah, dan pembuatan produk nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Model ini berakar pada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung.

Pembelajaran berbasis proyek menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah, menganalisis, dan mengaplikasikannya dalam bentuk proyek nyata.

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan kompetensi dan karakter, materi esensial dan pembelajaran kontekstual. Salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menekankan pembelajaran berbasis proyek.

Pembelajaran di SMK diarahkan pada pendekatan berbasis proyek untuk melatih siswa menghadapi situasi nyata di dunia kerja. Proyek ini melibatkan kolaborasi antara siswa, guru, dan mitra industri. Pembelajaran biasanya dikaitkan dengan kegiatan praktik, produksi, maupun simulasi kerja yang menyerupai kondisi industri. Hal ini sejalan dengan konsep *teaching factory* yang menggabungkan pembelajaran dengan proses produksi nyata. Contohnya, di SMK dengan kompetensi keahlian otomotif, siswa dapat mengembangkan proyek perbaikan kendaraan bermotor bersama industri terkait.

b. Struktur Kurikulum yang Fleksibel

Struktur kurikulum merupakan kerangka dasar yang mengatur susunan mata pelajaran, alokasi waktu, serta pengorganisasian pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Dalam Kurikulum Merdeka, struktur kurikulum dirancang lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas ini

bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, relevan, dan berpusat pada siswa.

Fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka berarti adanya kebebasan dalam menentukan strategi pembelajaran, mengatur alokasi waktu, mengembangkan materi ajar, dan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Konsep ini memungkinkan guru untuk tidak terpaku pada satu metode atau buku tertentu, tetapi dapat berinovasi sesuai dengan kondisi kelas.

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyusun dan merancang program pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan perkembangan zaman. Contohnya, Penyesuaian modul ajar sesuai dengan minat dan bakat siswa, pemilihan metode pembelajaran sesuai konteks lokal atau kemampuan siswa.

c. Pendidikan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai moral dan etika kepada siswa agar memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku.

Profil Pelajar Pancasila merupakan gambaran ideal siswa yang memiliki karakter dan kompetensi sesuai nilai-nilai Pancasila. SMK menerapkan pendidikan karakter yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, yaitu:

- Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
- Berkebhinekaan global.

- Gotong royong.
- Mandiri.
- Bernalar kritis.
- Kreatif.

Profil ini menjadi arah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah.

d. Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Dunia usaha dan dunia industri (DUDI) merupakan sector yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, baik dalam produksi barang maupun jasa. Dalam pendidikan DUDI berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kompetensi peserta didik, khususnya pada pendidikan vokasional seperti SMK. Keterlibatan DUDI dalam pendidikan bertujuan untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

SMK menjalin kemitraan erat dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini diwujudkan melalui program praktik kerja lapangan (PKL), Teaching Factory (TEFA), kelas industry, guru tamu, kunjungan industry, dan sertifikat kompetensi. Keterlibatan DUDI menjadi sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan industri.

e. Asesmen yang Holistik

Asesmen holistik merupakan pendekatan penilaian yang menilai peserta didik secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kemampuan dan perkembangan siswa, tidak hanya

berdasarkan nilai angka. Asesmen holistik sejalan dengan prinsip pendidikan yang menekankan keseimbangan antara aspek intelektual, emosional, dan keterampilan. Asesmen holistik menggunakan berbagai teknik penilaian, antara lain, observasi, penilaian kinerja, portofolio, proyek, tes tertulis dan lisan, penilaian diri dan teman sebaya.

Kurikulum Merdeka di SMK menggunakan asesmen berbasis kompetensi. Guru tidak hanya menilai hasil belajar siswa dari aspek kognitif, tetapi juga dari aspek keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif). Misalnya, seorang siswa jurusan tata boga tidak hanya diuji pengetahuannya tentang resep masakan, tetapi juga kemampuannya untuk memasak dan menyajikan makanan dengan standar profesional.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Kurikulum Merdeka di SMK menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1) Kesiapan Guru

Perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik menuntut guru untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Tidak semua guru siap dengan perubahan ini, terutama mereka yang telah lama terbiasa dengan metode konvensional. Pergeseran ini bukan sekedar mengganti perangkat ajar, tetapi juga mengubah cara berfikir, merancang pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar siswa secara lebih holistik. Keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep dan prinsip dasar Kurikulum Merdeka, menghimbau pemerintah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi. Masih terdapat guru yang belum sepenuhnya memahami penerapan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini

menyebabkan implementasi di lapangan sering kali belum maksimal dan cenderung hanya bersifat administrative, bukan substantif .

Banyak guru SMK yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka. Dibutuhkan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam menggunakan pendekatan berbasis proyek. Kesiapan guru menjadi kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Diperlukan upaya berkelanjutan berupa pelatihan yang relevan, pendampingan intensif, serta penguatan komunitas belajar agar guru mampu beradaptasi dan berkembang.

2) Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek, sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, pada kenyataannya, tidak semua satuan pendidikan memiliki fasilitas yang sesuai untuk menunjang pelaksanaan tersebut secara optimal. Keterbatasan ruang dan fasilitas praktik juga menjadi tantangan tersendiri. Pembelajaran berbasis proyek menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka memerlukan ruang khusus, alat praktik, serta bahan pendukung yang memadai. Sekolah dengan keterbatasan ruang kelas, laboratorium, atau peralatan praktik akan kesulitan dalam memberikan pengalaman belajar yang maksimal kepada peserta didik. Akibatnya, pelaksanaan pembelajaran cenderung kembali pada metode konvensional yang kurang sesuai dengan semangat Kurikulum merdeka.

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur menjadi tantangan nyata dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menyediakan sarana yang

memadai. Upaya seperti optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada, penguatan kolaborasi dengan pihak eksternal, serta pemerataan bantuan pendidikan menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum secara menyeluruh.

3) Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa semangat penguatan keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, dalam praktiknya, keterlibatan DUDI masih menjadi salah satu tantangan. Kurikulum ini menuntut adanya kolaborasi nyata agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual, relevan dengan kebutuhan kerja, serta mampu membekali peserta didik dengan ketrampilan. Sayangnya, tidak semua satuan pendidikan berhasil membangun kemitraan yang kuat dengan pihak industri.

Perbedaan kepentingan antara pihak sekolah dan dunia industri juga menjadi tantangan tersendiri. Dunia industri cenderung berorientasi pada efisiensi dan produktivitas, sehingga tidak selalu memiliki waktu dan sumber daya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan. Sementara itu, sekolah membutuhkan dukungan dalam bentuk pembinaan, penyediaan tempat PKL, hingga kontribusi dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidaksesuaian ini sering kali menghambat terjalannya kerja sama yang berkelanjutan. Keterbatasan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri menjadi tantangan nyata dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Diperlukan upaya strategis seperti memperluas kemitraan, meningkatkan komunikasi lintas sektor, serta membangun

kesadaran bersama akan pentingnya kolaborasi antara pendidikan dan industri .

4) Perbedaan Kondisi Sosial Ekonomi

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan belajar yang lebih luas, menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta mendorong pengembangan potensi secara optimal. Namun, menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik memiliki akses dan dukungan yang sama untuk memanfaatkan kebebasan tersebut. Perbedaan kondisi sosial ekonomi sangat memengaruhi kesiapan dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik dari keluarga dengan ekonomi yang lebih baik umumnya memiliki akses terhadap berbagai sumber belajar, seperti perangkat digital, buku tambahan, serta lingkungan belajar yang kondusif. Sebaliknya, siswa dari keluarga kurang mampu sering menghadapi keterbatasan, baik dalam hal fasilitas belajar maupun dukungan dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian hasil belajar antar siswa menjadi semakin nyata.

Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek yang terkadang membutuhkan biaya tambahan, seperti untuk pengadaan bahan, alat, atau kegiatan di luar sekolah. Bagi sebagian siswa, hal ini menjadi beban tersendiri yang dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran. Dalam situasi seperti ini, siswa berpotensi merasa tertinggal atau kurang percaya diri dibandingkan dengan teman-temannya yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.

Kesenjangan sosial ekonomi juga berdampak pada peran sekolah dalam mengakomodasi kebutuhan siswa. Sekolah dengan sumber daya

terbatas mungkin kesulitan menyediakan bantuan atau fasilitas tambahan untuk mendukung siswa kurang mampu.

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

a) Peningkatan Kompetensi Guru

Untuk mengatasi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka, peningkatan kompetensi guru menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum dituntut tidak hanya memahami konsep dasar Kurikulum Merdeka, tetapi juga mampu menerapkannya secara sistematis, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu upaya utama adalah melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tetapi juga pada praktik langsung, seperti penyusunan modul ajar, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta penggunaan asesmen diagnostik dan formatif.

Penguatan komunitas belajar guru juga menjadi solusi yang efektif. Melalui forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau komunitas belajar di sekolah, guru dapat saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan mencari solusi bersama atas berbagai kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan sebagai sarana peningkatan kompetensi.

Peran kepala sekolah dan pengawas juga sangat penting dalam mendukung peningkatan kompetensi guru. Melalui supervisi akademik

yang konstruktif, pendampingan, serta pemberian umpan balik yang berkelanjutan, guru dapat dibantu untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran. Lingkungan sekolah yang suportif akan mendorong guru untuk berinovasi dan tidak takut mencoba pendekatan baru dalam pembelajaran.

b) Pengembangan Infrastruktur Sekolah

Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran yang fleksibel, inovatif, serta berbasis proyek, sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas di sekolah, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta ruang praktik yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Sekolah perlu memastikan bahwa fasilitas yang ada tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan peserta didik.

Penguatan infrastruktur digital juga menjadi prioritas dalam era pembelajaran Kurikulum Merdeka. Penyediaan akses internet yang stabil, perangkat teknologi seperti komputer/laptop, serta media pembelajarandigital sangat penting untuk mendukung proses belajar yang interaktif dan berbasis teknologi. Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan menjadi kunci dalam pengembangan infrastruktur. Sekolah perlu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana secara matang, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, serta memastikan penggunaan dana dilakukan secara tepat sasaran. Perencanaan yang baik

akan membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas fasilitas secara bertahap dan berkelanjutan.

c) Kemitraan yang Lebih Kuat dengan Industri

Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut adanya keterhubungan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan dunia industri. Namun, dalam praktiknya, membangun kemitraan yang kuat dengan industri bukanlah hal yang sederhana. Perbedaan orientasi di mana sekolah berfokus pada pembelajaran jangka panjang sementara industri berorientasi pada produktivitas dan efisiensi, seringkali menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan akses, kurangnya komunikasi yang intens, serta belum adanya kerangka kerja kolaborasi yang jelas membuat potensi kerja sama ini belum optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan adaptif. Sekolah perlu proaktif menjalin komunikasi dengan pelaku industri melalui forum diskusi, kunjungan industri, maupun program magang yang dirancang bersama. Dalam hal ini, peran pemerintah dan pemangku kebijakan menjadi krusial sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan kedua belah pihak, sekaligus menyediakan regulasi yang mendukung kolaborasi berkelanjutan. Di sisi lain, industri juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan kurikulum. Dengan demikian, materi pembelajaran yang disusun dapat lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Keterlibatan ini tidak harus selalu dalam bentuk kontribusi besar; bahkan berbagi pengalaman praktis, menjadi narasumber, atau

membuka kesempatan kunjungan singkat sudah dapat memberikan dampak signifikan bagi peserta didik.

Penting pula untuk membangun budaya saling percaya antara sekolah dan industri. Transparansi tujuan, kejelasan manfaat bagi kedua pihak, serta komitmen jangka panjang akan menjadi fondasi kemitraan yang kokoh. Sekolah tidak hanya diposisikan sebagai penyedia lulusan, tetapi sebagai mitra strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. Dengan langkah-langkah tersebut, tantangan dalam membangun kemitraan dapat diubah menjadi peluang. Kurikulum Merdeka pun tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar terimplementasi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan realitas industri, sehingga menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dinamika masa depan

d) Pemberdayaan Komunitas Lokal

Pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi strategi efektif untuk melibatkan komunitas secara langsung. Peserta didik dapat diajak mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan sekitar, kemudian bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi. Dengan cara ini, komunitas tidak hanya menjadi objek, tetapi juga mitra aktif dalam proses pendidikan. Hal ini sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

Penting bagi sekolah untuk menghargai kearifan lokal sebagai sumber belajar yang berharga. Tradisi, budaya, dan praktik sosial yang

berkembang di masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memperkuat identitas dan karakter mereka. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting sebagai fasilitator yang mampu menjembatani antara kurikulum formal dan potensi lokal. SMK dapat melibatkan komunitas lokal dalam pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa dapat mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

e) Pendekatan Asesmen Formatif dan Sumatif yang Seimbang

Penilaian masih cenderung berfokus pada hasil akhir melalui ujian atau tes sumatif, sehingga proses belajar peserta didik kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, potensi untuk memahami perkembangan belajar secara menyeluruh sering terlewatkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan paradigma dalam memaknai asesmen. Asesmen formatif perlu diposisikan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, bukan sekadar pelengkap. Guru dapat memanfaatkan berbagai strategi seperti observasi, refleksi diri, umpan balik langsung, serta penugasan berbasis proyek untuk memantau perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya menilai apa yang telah dicapai, tetapi juga memahami bagaimana proses belajar itu berlangsung.

Di sisi lain, asesmen sumatif tetap memiliki peran penting sebagai alat untuk mengukur pencapaian kompetensi pada akhir periode pembelajaran. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang secara lebih autentik dan kontekstual, sehingga tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga

kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Dengan demikian, hasil asesmen sumatif dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kemampuan peserta didik. Keseimbangan antara kedua jenis asesmen ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang. Guru perlu merancang alur pembelajaran yang secara jelas mengintegrasikan momen-momen asesmen formatif dan sumatif, serta memastikan bahwa keduanya saling melengkapi. Hasil dari asesmen formatif dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran sebelum dilakukan penilaian sumatif.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti:

- Meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global.
- Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
- Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
- Mendorong inovasi dan kreativitas siswa.

Dengan implementasi yang efektif, Kurikulum Merdeka dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia. Hal ini juga menjadi peluang bagi SMK untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Telah ada

beberapa penelitian yang mengkaji tentang Implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Adapun penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini antara lain ;

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Luthfi et al. (2024)	Studi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Pada SMKN 1 Solok Sumatera Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMKN 1 Solok mengadopsi kurikulum ini dengan beberapa inisiatif, termasuk PKL dan TEFA, untuk memperkuat keterampilan praktis siswa. Meskipun belum mencapai status SMK PK, sekolah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Penelitian ini memberikan wawasan tentang implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SMKN 1 Solok, menyoroti keberhasilan, tantangan, dan dampaknya terhadap kesiapan kerja siswa. Hasilnya berguna bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan industri dalam mengembangkan kurikulum SMK yang lebih efektif dan relevan.
2.	Mujab, Rosa and Gumelar (2023)	Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu)	Hasil penelitian ini menunjukan 1) Implementasi kurikulum merdeka belajar di SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu melalui tahapan input, proses dan output, 2) kendala-kendala implementasi kurikulum merdeka yaitu perlunya peningkatan kompetensi guru, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran perlu ditingkatkan, perlunya menciptakan suasana pembelajaran efektif sesuai dengan keadaan industri, dan 3) upaya mengatasi kendala implementasi kurikulum merdeka yaitu meningkatkan kompetensi guru,

			menjalin kerjasama dengan pihak industri untuk, pengembangan metode pembelajaran yang menciptakan suasana kerja di industri.
3.	Yaelasari and Yuni Astuti (2022)	Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Cara Belajar Siswa Untuk Semua Mata Pelajaran (Studi Kasus Pembelajaran Tatap Muka di SMK INFOKOM Bogor)	Dengan penerapan cara belajar sebagaimana hasil dan pembahasan dalam implementasi kurikulum merdeka pada cara belajar siswa untuk semua mata pelajaran (studi kasus pembelajaran tatap muka di SMK INFOKOM Bogor), hasil yang diharapkan pada siswa dapat terlaksana. FGD telah memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman, dan guru SMK INFOKOM Kota Bogor merasakan adanya manfaat atas pelaksanaan diskusi kelompok terarah untuk memahami penyusunan skenario pembelajaran dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar.
4.	Lutfiana (2022)	Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Matematika SMK Dipenogoro Banyuputih	(1) Kurikulum operasional satuan pendidikan terapan (KOSP) harus dijadikan pedoman dalam merancang pembelajaran. Aspek lingkungan pendidikan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RPP matematika, dan dapat mengakomodir tuntutan siswa. Siswa melakukan penilaian awal sebelum membuat rencana untuk menentukan potensi, sifat, kebutuhan, tahap perkembangan, tingkat pencapaian akademik, dan faktor fundamental lainnya. konfigurasi proses pembelajaran matematika berdasarkan temuan evaluasi diagnostik.

			Selain itu, siswa dikategorikan menurut tingkat keterampilan selama perencanaan. (2) Penerapan pembelajaran yang bervariasi dalam pemecahan masalah sesuai dengan bakat atau kapasitas siswa diperlukan untuk menghasilkan pembelajaran matematika yang menarik. Siswa diberi kebebasan (kemandirian) untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuannya dalam program pembelajaran mandiri. Untuk mencapai tujuan belajar mandiri, seorang guru harus benar-benar memahami keadaan dan bakat siswa. Akan mudah untuk menggunakan model atau strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap siswa jika guru sudah memiliki pemahaman yang baik tentang murid-muridnya. (3) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, guru menggunakan penilaian autentik berbasis <i>assessment for learning</i>, <i>assessment as learning</i> dan <i>assessment of learning</i>.
--	--	--	--

5.	Pratiwi, Marlina and Kurniawan (2023)	Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada Siswa SMK Texar Karawang	Keterlaksanaan kurikulum merdeka belajar dapat dikatakan baik pada beberapa aspek pembelajaran seperti aspek keterampilan gerak, aspek pengetahuan gerak, aspek pemanfaatan dan pengembangan gerak ataupun dari aspek penguatan profil pancasila. Dari hasil keseluruhan juga terlihat minat siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK di masa kurikulum merdeka sangat tinggi, sehingga pelaksanaan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik dan terus ditingkat lagi.
----	---------------------------------------	--	---

Berdasarkan Tabel 1 Penelitian Terdahulu mengenai implementasi Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini membawa paradigma baru dalam sistem pembelajaran, khususnya dalam hal fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, dan penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning) mengungkapkan bahwa pendekatan diferensiasi membuat peserta didik lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam proses belajar.

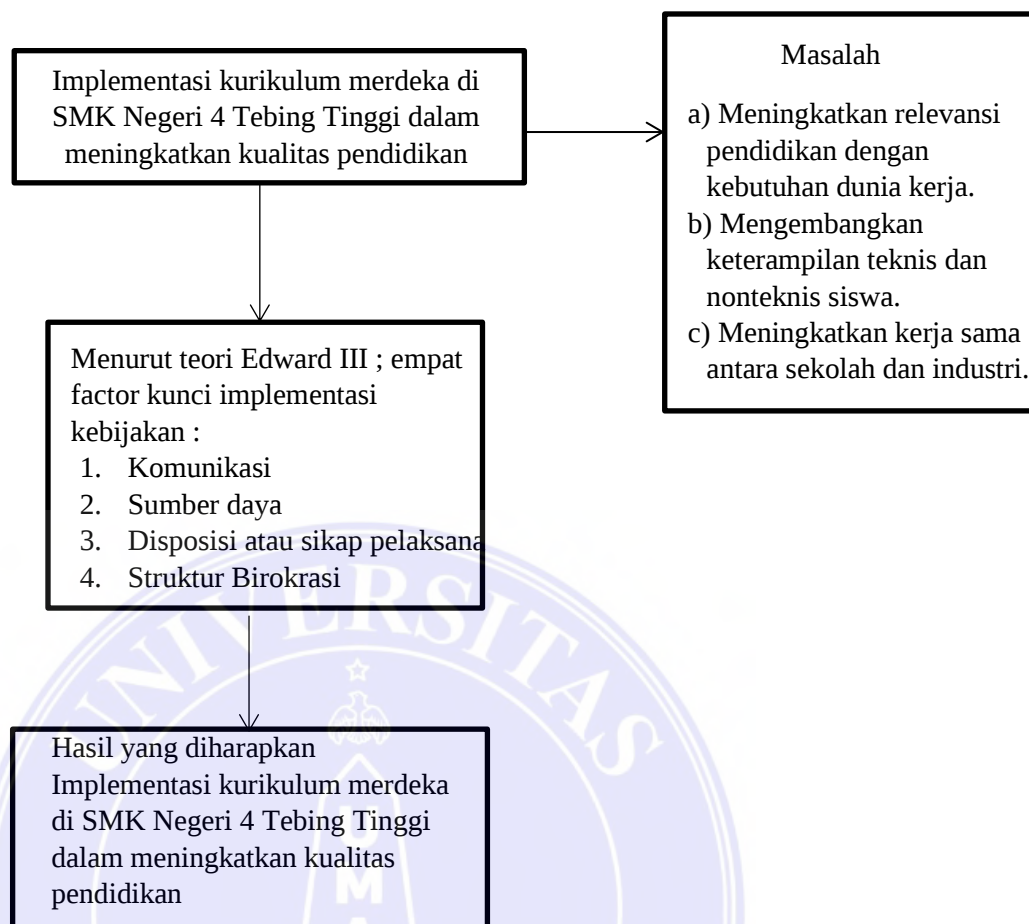
Implementasi Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kompetensi dan kesiapan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, dan konsistensi kebijakan dan pendampingan dari pemerintah.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan.

Kerangka pemikiran, alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis. Dalam Sugiyono (2015;91) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antara variabel yang disusun teori yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Dalam menjawab rumusan masalah, penulis mengambil teori peranan dari Menurut, teori implementasi George G. Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Bogdan dan Taylor (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari yang terjadi pada implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada

pertimbangan-perimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini penelitian diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwama, 2015:243). Dalam penelitian ini penulis memilih SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, Jalan Abdul Hamid No.103, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama Bulan Desember 2025 s/d Januari 2026.

Penelitian melaksanakan penelitian tentang “ Implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan”.

Tabel 3.2.2 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agus 2025	Sept 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
1.	Pengajuan judul												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Bimbingan Proposal												
4.	Seminar Proposal												
5.	Revisi Proposal												
6.	Data/ Penelitian												
7.	Seminar Hasil												
8.	Revisi Tesis												
9.	Sidang												

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi, data, dan keterangan yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih secara sengaja (purposive) karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong (2018) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan tidak sekadar menjadi objek penelitian, tetapi juga menjadi sumber data utama yang memberikan makna terhadap fenomena yang diteliti.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300). Dengan demikian, informan penelitian adalah individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap fokus penelitian sehingga mampu memberikan data yang mendalam, akurat, dan relevan.

Penentuan informan menurut Burhan Bungin (2015), dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu berdasarkan pada :

1. Informan memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti
2. Informan terlibat langsung dalam pelaksanaan/program yang diteliti
3. Informan bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan Kunci, merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25), Maka informan yang peneliti jadikan informan kunci adalah Kepala sekolah SMK Negeri 4 Tebing Tinggi yaitu Bapak Amiruddin, S.Pd

2. Informan utama

Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25) maka informan utama adalah mereka yang ikut langsung terlibat dalam kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi informan utama adalah Guru SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, yaitu :

1. Ibu Siti Aisyah, S.P., M.Agr
2. Bapak Bahdan Saragih, S.P., M.P
3. Ibu Marisi Br Tinjak, S.Kom., M.Pd
4. Ibu Olivia Lestari hutabarat, S.S., M.Hum

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2019: 25), Maka informan yang memberikan informasi tambahan bagi peneliti adalah peserta didik SMK Negeri 4 Tebing Tinggi diantaranya adalah:

1. Nurul Diah Utami kelas XII APHP
2. Vivi Agustri Kelas XII APHP
3. M.Agil Perdana Kelas XI APHP

Tabel 2 Informan Penelitian

No.	NAMA	JABATAN PEKERJAAN
1.	Amiruddin, S.Pd	Kepala Sekolah
2.	Siti Aisyah, M. Agr	Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
3.	Bahdan Saragih, MP	Wakil kepala sekolah bidang HuMas
4.	Olivia Lestari Hutabarat, M. Hum,	Guru
5.	Marisi Br. Tinjak, S. Kom, M. Pd.	Guru
6.	Nurul Diah Utami	Siswa
7.	Vivi Agustri	Siswa
8.	M. Agil Perdana	Siswa

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Catherina Marshall dan Gretchen yang dikutip oleh Andi Prastowo (2010;20) menjelaskan bahwa, metode-metode utama yang digunakan oleh para penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian, harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian.

Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama

penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Disisi lain teknik observasi digunakan sebagai penelitian yang berkenaan dengan perilaku. Dalam penelitian ini kurang lebih dalam waktu satu bulan. Selama penelitian di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi peneliti mencari tau bagaimana Implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencari tau solusi dari permasalahan berikut.

b. Wawancara

Menurut buku metode Penelitian Kualitatif Sugiyono (2012:137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*, dimana penelitian mengajukan pertanyaan –pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab langsung oleh masyarakat tersebut. Atau terknik wawancara, adalah melakukan langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan Tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat. Adapun wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide. Dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Selain itu wawancara bisa dikatakan juga sebagai kegiatan mencari data secara mendalam melalui proses percakapan yang direkam oleh penulis dengan informan kunci maupun informan tambahan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan oleh

penulis dan juga menanyakan apa saja implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam buku menguasai teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif Andi (2010;191) dijelaskan bahwa, Dokumen merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penelitian. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, penelitian menggunakan dokumen sebagai sumber data yang mendukung dari sumber data sebelumnya yaitu wawancara dan observasi. Dapat dikatakan juga bahwa dokumen merupakan rekaman yang biasa saja bersifat tulisan dan isinya merupakan peristiwa yang sudah maupun berbentuk video.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti ; observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan

sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

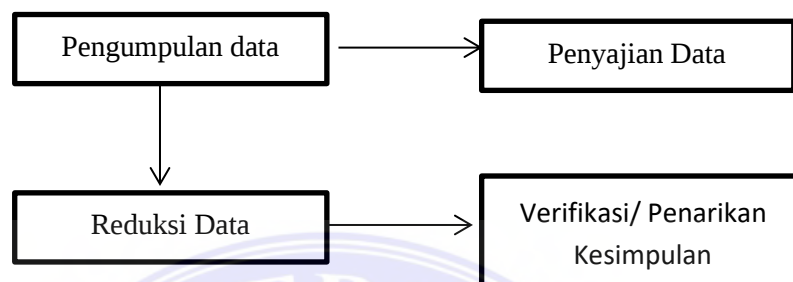
3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak

hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.6. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Menurut teori Edward III, keberhasilan implementasi program pendidikan seperti Kurikulum Merdeka bergantung pada dua komponen utama:

- a. Communication (Komunikasi): Kurikulum Merdeka harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pemangku kepentingan : guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, siswa, dan orang tua. Informasi yang tidak konsisten akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.
- b. Human Resources (Sumber Daya Manusia): Peran guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga pendukung sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana yang cukup akan membuat pembelajaran berbasis

proyek dan diferensiasi bisa berjalan. Kualitas SDM menentukan efektivitas penerapan kurikulum.

Dengan mengacu pada teori Edward III, Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dapat dipahami sebagai sebuah proses transformasi yang menyeluruh, melibatkan komponen-komponen berikut:

1. Transformasi Guru: Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual.
2. Inovasi Metode Pembelajaran: Siswa diberi ruang untuk belajar melalui proyek yang relevan dengan situasi nyata, seperti magang di industri atau simulasi kerja.
3. Pengembangan Karakter dan Kompetensi Abad ke-21: Pembelajaran diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi .
4. Penguatan Link and Match dengan DUDI: Sekolah bekerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja.

Dalam konteks ini, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi upaya strategis untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan teknis dan soft skills yang memadai.

Implementasi ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan:

1. Meningkatkan keterampilan kejuruan siswa agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di era globalisasi.
2. Membentuk siswa yang mandiri, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sosial.
3. Menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana siswa dan guru sama-sama menjadi subjek dalam proses pembelajaran.

3.6.2. Definisi Operasional

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional menjadi variabel-variabel penelitian. Menurut teori Edward VI, keberhasilan implementasi program pendidikan seperti Kurikulum Merdeka bergantung pada empat komponen utama:

1. Communication (Komunikasi)
 - Sosialisasi kurikulum dilakukan secara massif dan konsisten oleh Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi
 - Guru dan tenaga kependidikan memahami tujuan dan prinsip Kurikulum Merdeka
2. Human Resources (Sumber Daya Manusia):
 - Kesiapan guru dalam merancang modul ajar yang berbasis proyek (Project-Based Learning).
 - Pelatihan kompetensi guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

- Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif.

3. Disposition/Attitude (Disposisi atau sikap pelaksana)::

- Guru dan kepala sekolah memiliki sikap positif terhadap kurikulum baru
- Adanya kemauan untuk berubah, berinovasi, dan mengembangkan pembelajaran diferensiasi
- Dukungan dari pemangku kepentingan lokal (orangtua, komite sekolah, dinas pendidikan)

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi):

- Regulasi yang jelas namun tidak terlalu birokratis
- Struktur organisasi pendidikan fleksibel dan mendukung inovasi.

Merdeka, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta kesiapan kerja peserta didik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah ini telah dilakukan secara administratif dan struktural sesuai dengan arahan kebijakan nasional. Petunjuk pelaksanaan kurikulum tersedia melalui pedoman dari pemerintah pusat dan dinas pendidikan, rapat guru, workshop internal, serta modul ajar yang disusun oleh guru. Secara kebijakan, sekolah telah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi peserta didik dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek serta diferensiasi pembelajaran.

Namun, secara substantif, implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan.

Hal ini terlihat dari:

- a. Masih dominannya penggunaan pendekatan pembelajaran konvensional.
- b. Kurangnya pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran berbasis proyek dan asesmen diagnostik.
- c. Pemahaman siswa yang terbatas mengenai tujuan, mekanisme, dan kriteria penilaian proyek berbasis kompetensi.

Dengan demikian, meskipun kurikulum telah dijalankan secara formal, Kurikulum Merdeka lebih banyak dipersepsikan sebagai kewajiban administratif daripada sebagai instrumen transformasi pembelajaran. Perubahan budaya belajar, pola pikir guru, dan praktik pedagogik di kelas masih membutuhkan waktu dan upaya pembinaan lebih lanjut.

2. Faktor penghambat implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok faktor utama yang menghambat implementasi kurikulum, yaitu faktor komunikasi dan sumber daya:

a. Faktor komunikasi

- 1) Ketidakjelasan dan inkonsistensi arahan dari pemerintah pusat menyebabkan guru mengalami kesulitan menyesuaikan modul ajar, metode pembelajaran, dan asesmen.
- 2) Pemahaman guru dan siswa terhadap Kurikulum Merdeka masih terbatas, sehingga praktik pembelajaran berbasis proyek belum optimal.

- 3) Sosialisasi dan pendampingan praktis terhadap guru dalam implementasi kurikulum masih terbatas, mengurangi kepercayaan diri guru dalam menerapkan kebijakan.

b. Faktor sumber daya

1. Kompetensi guru yang belum merata, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik, menjadi penghambat utama.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana praktik kejuruan, seperti laboratorium, bengkel, dan peralatan pendukung, membatasi kemampuan siswa mencapai kompetensi kejuruan.
3. Keterbatasan waktu dan beban kerja guru memengaruhi kesiapan mereka dalam menyusun modul ajar dan melaksanakan proyek.
4. Dukungan anggaran dan kebijakan internal untuk pengadaan alat praktik dan teknologi pendukung masih terbatas.

Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada perbaikan sistem komunikasi kebijakan dan penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan. Tanpa perbaikan kedua aspek tersebut, tujuan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan kerja siswa akan sulit tercapai secara optimal.

Model Implementasi kebijakan yang digunakan menurut George C. Edward III. Menurutnya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada empat faktor (variabel) utama yang saling berhubungan, yaitu :

- a. Komunikasi (Communication) dengan indicator

- Transmisi : Perintah dan petunjuk pelaksanaan harus disampaikan secara jelas kepada orang yang tepat
 - Kejelasan : Instruksi tidak boleh membingungkan atau bermakna ganda. Jika petunjuknya kabur, pelaksana akan menginterpretasikannya sendiri-sendiri
 - Konsisten : Instruksi yang diberikan harus konsisten. Jika perintah berubah-ubah, akan timbul kebingungan di tingkat bawah.
- b. Sumber Daya (Resources), dengan indicator :
- Staf (Manpower) : Jumlah staf yang cukup dan memiliki keahlian yang relevan.
 - Informasi : Pengetahuan tentang cara melaksanakan kebijakan dan data mengenai kepatuhan pihak lain
 - Wewenang : Legalitas pelaksana untuk membuat keputusan atau memaksa kepatuhan
 - Fasilitas : Sarana fisik seperti gedung, peralatan, dan teknologi yang menunjang pekerjaan
- c. Disposisi (Disposition), dengan indicator
- Dukungan Implementor: Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Jika tidak, mereka mungkin melakukan penghambatan (sabotase)
 - Insentif: Adanya penghargaan (reward) atau sanksi (punishment) dapat mempengaruhi motivasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai aturan.
- d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Srtucture) dengan indicator

- Standard Operating Procedures (SOP): Prosedur tetap yang membantu menyederhanakan tugas-tugas kompleks. Namun, SOP yang terlalu kaku bisa menghambat inovasi jika situasi di lapangan berubah
- Fragmentasi: Pembagian tanggung jawab di antara berbagai unit kerja. Jika koordinasi antar unit buruk, implementasi akan tersekat-sekat dan tidak efisien.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran strategis untuk mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi:

1. Saran untuk pihak sekolah

- a. Memperkuat komunikasi internal dan eksternal terkait Kurikulum Merdeka melalui sosialisasi rutin, pendampingan intensif, dan penyediaan pedoman teknis yang jelas.
- b. Meningkatkan kapasitas guru secara berkelanjutan melalui pelatihan berbasis praktik, mentoring, dan workshop terkait pembelajaran berbasis proyek, asesmen autentik, dan diferensiasi pembelajaran.
- c. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana praktik sesuai kebutuhan kurikulum kejuruan agar proyek-proyek pembelajaran dapat dilaksanakan optimal.
- d. Menyusun manajemen waktu dan beban kerja guru agar pelaksanaan proyek berbasis kompetensi lebih efektif dan tidak mengganggu tugas rutin guru.

2. Saran untuk pihak pemerintah dan dinas pendidikan

- a. Menyediakan arahan kebijakan yang konsisten dan stabil agar sekolah dapat menyesuaikan implementasi kurikulum tanpa kebingungan.
- b. Memberikan dukungan anggaran tambahan untuk pengadaan sarana praktik, teknologi pendukung, dan bahan ajar yang relevan dengan Kurikulum Merdeka.
- c. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan guru secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya

- a. Penelitian lebih lanjut dapat meneliti pengaruh penerapan Kurikulum Merdeka terhadap capaian kompetensi siswa secara kuantitatif, termasuk keterampilan soft skills dan kesiapan kerja.
- b. Penelitian juga dapat meneliti efektivitas metode pendampingan guru dalam implementasi kurikulum baru di SMK yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan praktik terbaik.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dapat lebih efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong kemandirian dan kreativitas siswa, serta mempersiapkan mereka secara optimal untuk menghadapi dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,L, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Aslan, 'Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia', dalam Jurnal Edukasia Islamika, Vol. 4. No. 2/ Tahun 2019, hlm. 171 Salinan Kepmen SMK Pusat Keunggulan, (Jakarta : Kemendikbudristek, 2021)
- Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 11(1), 15-34.
- Efyanto, D. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Kurikulum SMK. Pascasarjana, Direktorat Program Malang, Universitas Muhammadiyah, 1-83.
- Fitriana, L. (2020). Pendidikan Merdeka: Transformasi Sistem Pendidikan Nasional. . Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic, 2(1), 55-66.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 8(1), 43-64.
- Javanisa, A., Fauziah, F. F., & Riasita Melani, Z. A. R. (2022). Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik. Jurnal Kalam Pendidikan PGSD Kebumen, 1, 34-47.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen kurikulum sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 7(1), 119-125.
- Lince, L. (2022, May). Implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai (Vol. 1, pp. 38-49).
- Lutfiana, D. (2022) 'PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH', *Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 2(4).
- Luthfi, A. et al. (2024) Studi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Pada SMKN 1 Solok Sumatera Barat.
- Mazmanian,D.A., dan Sabatier,P.A. (1983), Implementation and public policy, Glenview,L: Scott, Foresman and Company
- Moleong, L.J (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

- Mujab, S., Rosa, A.T.R. and Gumelar, W.S. (2023) *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu)*.
- Mulyasa, H. E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bumi Aksara.
- Nugroho, R, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Pertiwi, A. D., Nurfatimah, S. A., & Hasna, S. (2022). Menerapkan metode pembelajaran berorientasi student centered menuju masa transisi kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8839-8848.
- Pratiwi, S.A., Marlina, R. and Kurniawan, F. (2023) 'Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada Siswa SMK Texar Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 2023(1), pp. 525–535. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7551222>.
- Priyambodo, A. B. (2017). Implementasi pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada sekolah berlatar belakang Islam di Kota Pasuruan. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 9-15.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D.S., dan Van Horn, Carl E, 1975, *The Policy Implementation Process : A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4). Pp 445 - 488
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari masa ke masa (telaah atas pentahapan kurikulum pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 10(2), 231-242.
- Winarno, B, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Yaelasari.M. and Yuni Astuti, V. (2022) 'Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Cara Belajar Siswa Untuk Semua Mata Pelajaran (Studi Kasus Pembelajaran Tatap Muka di SMK INFOKOM Bogor)' *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(7), pp. 584-591. Available at: <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i7.1041>
- Yudhana, A. (2021). Merdeka Belajar: Revolusi Pendidikan Abad 21. . *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 15–22.

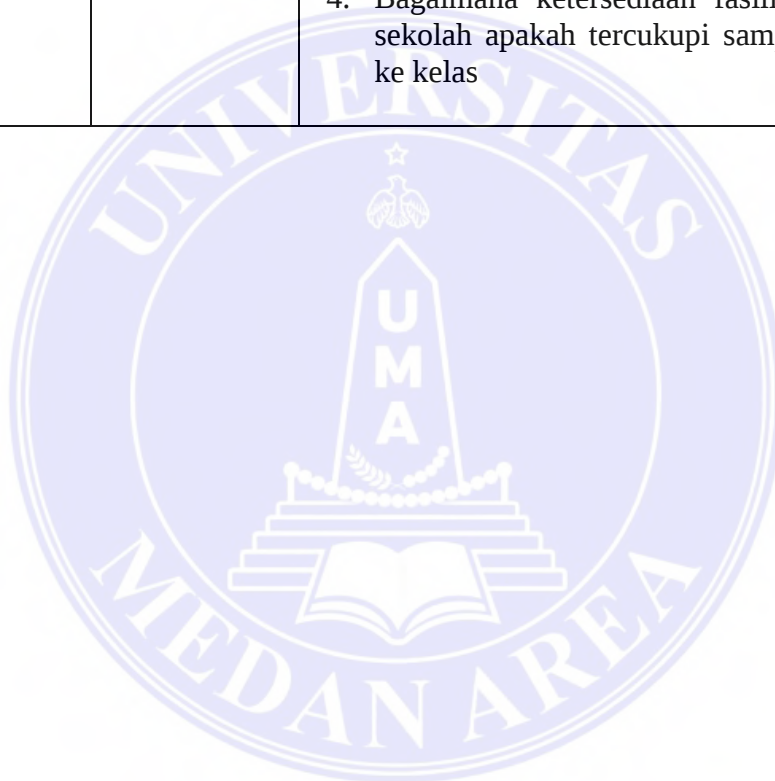
LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Aspek Penelitian	Sub Aspek	Pertanyaan Wawancara	Sumber Data /Informan
Komunikasi	a. Transmisi	1. Bagaimana bentuk petunjuk dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka? 2. Bagaimana proses menilai petunjuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka ? 3. Bagaimana proses sosialisasi Kurikulum merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi?	• Kepala Sekolah • Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
		4. Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan sosialisasi Kurikulum Merdeka ? 5. Apakah sekolah memiliki pedoman teknis yang lebih jelas sehingga guru-guru lebih mudah memahami pembelajaran Kurikulum Merdeka ?	• Kepala Sekolah
		6. Bagaimana penyampaian kebijakan Kurikulum Merdeka kepada guru ?	• guru
	b. Kejelasan	1. Bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi?	• Kepala Sekolah • Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
		2. Apakah di kelas sudah menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka? 3. Apakah kamu memahami tujuan kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila(P5)	• Siswa
	c. Konsistensi	1. Bagaimana sekolah menyikapi kebijakan Kurikulum Merdeka yang sering berubah-ubah	• Kepala sekolah

		2. Apakah setiap guru mampu memahami konsep dasar dari Kurikulum Merdeka	
		3. Apakah sekolah mengkomunikasikan ke orang tua siswa penilaian proyek dalam Kurikulum Merdeka	• Wakil Kepala sekolah bidang Humas
Sumber Daya	a. Staf Pelaksana	1. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia/guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka	• Kepala sekolah
		2. Bagaimana kesiapan guru dalam menyusun modul ajar sesuai Kurikulum Merdeka? 3. Apakah guru sudah mampu menyusun modul ajar sesuai pembelajaran Kurikulum Merdeka ?	• Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
	b. Informasi / penelitian	1. Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru.?	• Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
		2. Apakah pelatihan yang diterima guru sudah mencukupi? 3. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan implementasi Kurikulum Merdeka ?	• Guru
	c. Wewenang	1. Apa penyebab guru merasa kesulitan menyesuaikan waktu untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka ?	• Kepala sekolah
		2. Bagaimana koordinasi sekolah dengan pihak eksternal dalam implementasi Kurikulum Merdeka ?	• Wakil kepala sekolah bidang Humas
		3. Bagaimana kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka ?	• Guru

	d. Fasilitas	1. Bagaimana kesiapan sumber daya sarana prasarana dalam implementasi Kurikulum Merdeka ? 2. Apakah jumlah peralatan yang tersedia sudah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada? 3. Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dalam penerapan Kurikulum Merdeka ?	• Kepala sekolah • Guru
		4. Bagaimana ketersediaan fasilitas sekolah apakah tercukupi sampai ke kelas	• Siswa





Wawancara bersama Kepala Sekolah Bapak Amiruddin, S.Pd
Rabu, 17 Desember 2025, Pukul : 09.00 - 10.00 WIB

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

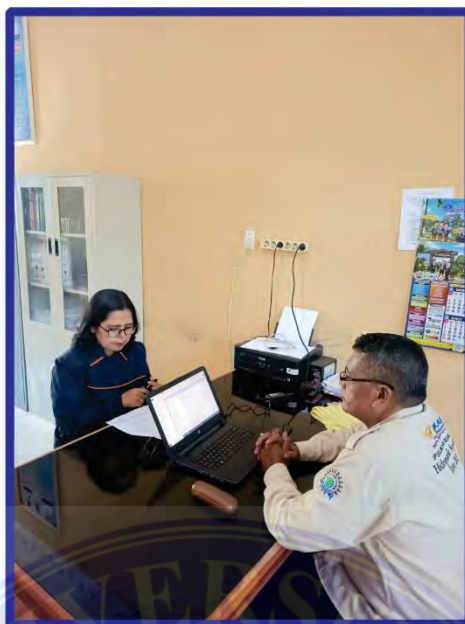
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26





**Wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Siti Aisyah, S.P, M.Agr
Selasa, 16 Desember 2025, Pukul : 11.00 - 12.00 WIB**



**Wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Bahdan Saragih, S.P, M.P
Selasa, 6 Januari 2026, Pukul : 14.00 - 15.00 WIB**



Wawancara bersama Guru Ibu Olivia Lestari Hutabarat, SS, M.Hum
Kamis, 18 Desember 2025, Pukul : 09.30 - 10.30 WIB



**Wawancara bersama Guru Mata Pelajaran Ibu Marisi Br. Tinjak, S.Kom, M.Pd
Selasa, 17 Desember 2025, Pukul : 14.00 - 15.00 WIB**



**Wawancara bersama Siswa, Nurul, Vivi, M. Agil
Senin, 12 Januari 2026, Pukul : 10.30 - 11.00 WIB**